

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHANDAN HUTAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA MAWAR SARI DAN PINANGKARA)

Muhammad Noor Hekmal<sup>1</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>2</sup>, Siti Raudah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [hekmalmuhammad@icloud.com](mailto:hekmalmuhammad@icloud.com)

### ABSTRAK

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan desa Mawarsari dan Pinangkara masih memiliki permasalahan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe diskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian cukup baik sesuai dengan indikator yaitu sasaran kebijakan, sosialisasi, *standar operating procedure*, respon implementor, koordinasi, kerjasama, pencapaian tujuan, wewenang dan kondisi politik. Adapun indikator yang masih kurang baik yaitu indikator staf, fasilitas, kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Faktor penghambat yaitu sedikitnya tenaga ahli kebencanaan, peralatan yang kurang lengkap dan keterbatasan sumber air dan akses jalan yang sempit. Kedua, faktor pendukung yaitu sasaran kebijakan, sosialisasi, SOP, komunikasi, kerjasama antar *Stakeholder* terkait sudah terjalin dengan baik, pencapaian, wewenang, dan kondisi politik. Disarankan kepada kepala pelaksana untuk melakukan pelatihan kepada petugas dan mengusahakan untuk memperbaharui peralatan. Kepada masyarakat agar memahami Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan mendukung para pelaksana dalam melakukan penanganan untuk meminimalisir munculnya kendala suatu kebijakan.

**Kata Kunci** : Implementasi, Peraturan Daerah

### ABSTRACT

*Controlling forest and land fires in Mawarsari and Pinangkara villages still has problems. The aim of this research is to determine the implementation of regional regulations and determine the factors that influence them. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The research results are quite good in accordance with the indicators, namely policy targets, socialization, standard operating procedures, implementor responses, coordination, cooperation, goal achievement, authority and political conditions. The indicators that are still not good are staff, facilities, social conditions and. The inhibiting factors are the small number of disaster experts, incomplete equipment and limited water, supporting factors, namely policy targets, socialization, SOPs, communication, cooperation between related stakeholders that have been well established, achievements, authority and political conditions. It is recommended that the chief executive conduct training for officers and try to update equipment. For the public to understand Regional Regulation Number 1 of 2008 and support implementers in carrying out measures to minimize the emergence of obstacles to a policy*

**Keywords**: Implementation, Lokal Regulation

## PENDAHULUAN

Indonesia dibagi atas daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta yang terendah adalah Desa, yang mana semua daerah tersebut memiliki pemerintahan yang otonomi dan diakui oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara yang menerapkan system desentralisasi yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara Pemerintahan tertib dan lancar tidak akan mungkin tercapai kalau segala sesuatu permasalahan diatur oleh pemerintahan pusat saja, tapi harus dibantu oleh Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan atau pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan di Daerah.

Pemerintahan daerah adalah sub sistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi tidak semua tugas-tugas atau urusan-urusan pemerintahan diserahkan pelaksanaannya pada Daerah dengan pertimbangan dan kemampuan Daerah,serta kepentingan nasional.

Pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari tiga asas yaitu asas Desentralisasi, asas Dekonsentrasi, dan asas Pembantuan. Dengan adanya asas desentralisasi maka terbentuklah Daerah Otonomi.

Tujuan pemberian Daerah Otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kebakaran hutan dan lahan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan ada dua faktor. Yang pertama karena ulah manusia yang meliputi pembukaan lahan berskala besar,pembukaan lahan oleh petani dan kegiatan-kegiatan rekriasi seperti objek wisata,perkemahan dan perburuan.

Yang kedua dikarenakan faktor alam yang biasanya terjadi pada musim kemarau dikarenakan curah hujan yang rendah dan terik matahari sangat panas mengakibatkan tumbuh-tumbuhan mengalami kekeringan sehingga mudah terbakar. Kebakaran hutan dan lahan tentu saja mempunyai dampak negatif bagi lingkungan dan juga manusia berupa meningkatnya polusi udara dikarenakan kebakaran hutan dan lahan menyebabkan lingkungan tidak sehat, merusak ekosistem, dan mengurangi keanekaragaman flora dan fauna.

Kebakaran hutan dan lahan pada lahan gambut biasanya lebih susah dikendalikan karenaapi mudah menjalar melalui biomassadiatas permukaan tanah dan lapisan gambut dibawah permukaan tanah.Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut yang diperkirakan luasnya 20,6 juta hektar yang 35% nya ialah pulau kalimantan.Pemerintah telah berupaya menangani Karhutla baik dalam bentuk peraturan maupun program akan tetapi karhutla tetap terjadi. Beberapa penelitian menunjukkan masalah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di antaranya kesulitan dalam koordinasi antar lembaga terkait, kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum terpadu, lemahnya penegakan hukum dana anggaran terbatas.

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak kerugian bagi lingkungan, sosial dan ekonomi. Bahkan persoalan kebakaran di Indonesia telah mengakibatkan persoalan asap bagi negara tetangga khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai luas hutan dan lahan 41.788 Hektar. Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri terdiri dari 10 Kecamatan, 219 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 892,70 km<sup>2</sup> yang didalamnya hampir separuh Kecamatan merupakan daerah rawan bencana. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kebakaran hutan dan lahan, karena memang dorongan faktor keadaan wilayah yang sebagian besar adalah hutan dan lahan yang sangat berpotensi menimbulkan kebakaran apalagi mengingat musim kemarau yang berkepanjangan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara termasuk daerah rawan bencana yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan serta angin puting beliung. Faktor yang disebabkan oleh faktor alam maupun ulah tangan manusia itu sendiri. Dalam menanggulangi bencana daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya bekerjasama dengan para TNI, Polisi, dan organisasi lain serta seluruh elemen masyarakat yang berada di wilayah Hulu Sungai Utara dan sekitar.

Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya kebakaran hutan terjadi pada pertengahan tahun. Untuk wilayah Hulu Sungai Utara ada 10 Kecamatan yang perlu di waspadai dimana beberapa titik rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu kecamatan Banjar, Haur Gading, Amuntai Tengah, Danau Panggang, Paminggir, dan Amuntai Selatan. Dalam melakukan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kekurangan tenaga ahli kebencanaan serta peralatan yang kurang memadai dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tim Reaksi Cepat Multisektor BPBD Kab.Hulu Sungai Utara terbagi terdiri dari Tim Pembina dan Anggota. Tim Pembina terdiri dari Pelindung, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pembina. Untuk Anggota Terdiri dari 2 Koordinator Lapangan, 29 Anggota dan 5 Anggota Lintas Sektor.

Anggota Tim Reaksi Cepat Multisektor BPBD kab.Hulu Sungai Utara memiliki tugas melakukan penanganan terhadap bencana di kabupaten Hulu Sungai Utara. saat ini hampir 50% adalah anggota baru dan belum memiliki spesiikasi/kemampuan atau keahlian dibidang tertentu yang mengacu pada pasal 8 ayat 2 Tim Reaksi Cepat BPBD Multisektor kab.Hulu Sungai Utara juga saat ini kurang dalam hal sarana prasarana yang memadai untuk petugas lapangan seperti mesin portable, selang, masker, Kacamata, Oksigen, Sepatu Boots dan baju pemadam. (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Hulu Sungai Utara).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis ketahui bahwa beberapa fenomena masalah yang ditemukan berkaitan dengan Implementasi Peraturan daerah Provinsi Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan di kabupaten Hulu Sungai Utara seperti :

1. Kurangnya sumber daya ahli kebencanaan yang bisa dipakai untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada saat terjadinya suatu bencana karena tenaga ahli memiliki wawasan tentang itu sehingga memudahkan dalam penanganan suatu kejadian dilapangan. Pasal 7 poin F menjelaskan adanya aturan untuk pengembangan teknologi dan prosedur terhadap penanganan pengendalian hutan dan lahan supaya menciptakan tenaga ahli kebencanaan yang mampu mengendalikan kebakaran.

2. Sarana prasarana yang kurang memadai pada saat kejadian kebakaran hutan dan lahan karena sarana prasarana merupakan komponen penting untuk keberlangsungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan itulah sebab yang sering terjadi yang membuat pemadaman dilapangan menjadi tidak efektif. Pasal 8 ayat 2 poin b dan c mengatur sarana dan prasarana sesuai prosedur.
3. Pemerintah sudah melakukan upaya sosialisasi mengenai peraturan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan namun pemerintah hanya memberikan sosialisasi tanpa solusi agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi.
4. Kurangnya komunikasi dalam satu forum yang meliputi pelaksanaan dan masyarakat dalam membahas pengurangan bencana kebakaran hutan mengacu pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Sehingga masyarakat berdiam diri dan tidak melapor pada saat terjadi kebakaran hutan pada instansi-instansi terkait.

## METODE

Lokasi penelitian ini, akan dilaksanakan di Desa Mawar Sari dan Pinangkara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber Informan pada penelitian berjumlah 11 orang menggunakan tehnik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trigulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan *member check*.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (Agustino,2016).

### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.

#### a. Sasaran Kebijakan

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan sudah sesuai, Para pelaksana penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan sasaran kebijakan yang ada yaitu untuk menanggulangi dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi didesa tersebut.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi adalah konsep umum yang diartikan sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan sosialisasi sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan masyarakat desa sekitar lalu membahas dampak dan tata cara menanggulangi kebakaran hutan dan lahan serta melakukan penyebaran spanduk-spanduk himbauan

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

### a. Staf atau Pegawai

Staf adalah sekelompok orang dalam suatu organisasi yang turut membantu ketua atau pimpinan.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan staf belum baik, belum baik terkait dengan petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan masih terkendala petugas yang dimiliki kebanyakan sudah berusia yang cukup tua dan kekurangan tenaga ahli muda kebencanaan dikarenakan belum adanya pelatihan.

Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. (Tono, Agustina and Rofiyanti, 2019)

### b. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dan merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan Fasilitas belum bisa dikatakan baik, karena masih terbatasnya anggaran yang membuat para pelaksana kesulitan memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga fasilitas yang dimiliki tidak memadai yang sering menjadi penghambat penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pelaksana. Hasil Penelitian ini tidak sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. (Asteriniah and Sutina, 2018)

## 3. Karakteristik organisasi pelaksanaan

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

### a. Standar Operating Procedure (SOP)

SOP dibuat dengan harapan dapat menciptakan ukuran standar kerja yang dapat memberikan pegawai yang berkerja di instansi pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan indikator yaitu SOP para pelaksana tugas sudah menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai SOP yang ada.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi.

#### **b. Respon Implementor**

Respon Implementor adalah tanggapan orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan untuk indikator Respon Implementor pelaksana sudah sangat setuju. Karena, peraturan ini mengacu untuk melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang pada dasarnya daerah desa Mawar Sari dan Pinangkara merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan (Kurniawan and Maani, 2020)

#### **4. Komunikasi**

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

##### **a. Koordinasi**

Proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif .

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan Koordinasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik. Para pelaksana sudah saling bantu membantu untuk menuju suatu tujuan dengan melakukan penanganan kebakaran yang terjadi di daerah tersebut.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam.

##### **b. Kerjasama**

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator kerjasama sudah ada dengan Instansi terkait dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang bertujuan melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

#### **5. Disposisi**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam "sikap penerimaan atau penolakan

Dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

## a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sesuai indikator Pencapaian petugas sudah optimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dimana kejadian kebakaran hutan ini sudah berhasil sehingga kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran tidak seperti tahun dahulu yang artinya tidak separah tahun-tahun terdahulu. (Agustino, 2016)

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu :”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

## b. Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa wewenang petugas penanganan kebakaran hutan memiliki wewenang akan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi yaitu dengan kegiatan melakukan penanganan, pengendalian, pencegahan dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media seperti Spanduk, Brosur dan siaran TV.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu :, intensitas disposisi para pelaksana implementors dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisamenyebabkan gagalnya implementasi kebijakan(Subarsono, 2011)

## 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses sosial dimana proses sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa indikator kondisi sosial ini kurang baik dikarenakan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena kendala kebakaran hutan dan lahan yang ditimbulkan dan juga kesehatan masyarakat mengalami penurunan akibat dampak yang ditimbulkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di kabupaten hulu sungai utara.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

## b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan suatu keadaan presentase ekonomi keluarga yang bisa diukur dari penggunaan finansial dalam periode tertentu.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dapat disimpulkan bahwa indikator kondisi ekonomi mengakibatkan pendapatan yang dihasilkan masyarakat berkurang dikarenakan hambatan-hambatan yang ditimbulkan dikarenakan kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten hulu sungai utara. (Anggara, 2014)

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

## c. Kondisi Politik

Kondisi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan sesuai indikator kondisi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan teraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Hulu Sungai Utara .

Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori implmentasi menurut Van Meter dan Van Horn yaitu : Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Mawar Sari dan Pinangkara) sebagai berikut :

### 1. Faktor Penghambat

#### a. Sedikitnya tenaga ahli kebencanaan

Dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tenaga ahli sangat dibutuhkan karena pada saat kebakaran hutan dan lahan karena itu memiliki keahlian yang membuat setiap kejadian yang ada menjadi efisien dalam penanganannya.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan faktor penghambat bahwa kendala yang dialami oleh petugas dikarenakan sumber daya manusia yang kami miliki kebanyakan sudah berumur dan tidak ada lagi pelatihan sehingga kurangnya tenaga ahli kebencanaan yang baru

#### b. Peralatan yang kurang lengkap untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan

Peralatan yang digunakan adalah faktor penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan masih terbatasnya anggaran yang membuat para pelaksana kesulitan memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga fasilitas yang dimiliki tidak memadai yang sering menjadi penghambat penanganan kebakaran hutan dan lahan oleh pelaksana.

#### c. Keterbatasan sumber air dilokasi kejadian dan akses jalan yang sulit dijangkau oleh petugas.

Dari pengalaman yang ditemui dilapangan yang sering menjadi kendala yaitu sulitnya mendapatkan sumber air untuk melakukan pemadaman.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan faktor penghambat aliran sungai mengering dilokasi kejadian yang disebabkan musim

kemarau serta curah hujan yang rendah itu membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Dan tidak hanya itu, akses jalan yang sulit dijangkau pun membuat petugas tidak bisa melakukan penanganan dengan membawa sumber air dari mobil pemadam yang dimiliki

## 2. Faktor Pendukung

a. **Kerjasama Antar Stakeholder Terkait Sudah Terjalin Dengan Baik** Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan Faktor pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah adanya kerjasama antar stakeholder terkait yaitu dengan TNI, Polri dan SKPD dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten hulu sungai utara. (Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., 2014)

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang pengendalian penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan indikator yaitu sasaran kebijakan, sosialisasi, *standar operating procedure*, respon implementor, koordinasi, kerjasama, pencapaian tujuan, wewenang dan kondisi politik. Adapun indikator yang masih kurang terlaksana dengan baik yaitu indikator staf, fasilitas, kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Adapun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yang pertama, faktor penghambat yaitu sedikitnya tenaga ahli kebencanaan, peralatan yang kurang lengkap dan keterbatasan sumber air dilokasi kejadian dan akses jalan yang sempit. Kedua, faktor pendukung yaitu pertama sasaran kebijakan, kedua sosialisasi, ketiga SOP, keempat komunikasi, kelima kerjasama antar *Stakeholder* terkait sudah terjalin dengan baik, keenam pencapaian, ketujuh wewenang, dan terakhir kondisi politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Alfa Beta.
- Anggara, D. sahya (2014) 'Kebijakan Publik', *Kebijakan Publik* [Preprint], (1993).
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI

- LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Asteriniah, F. and Sutina, S. (2018) 'Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Ogan Komering ILIR', *Jurnal Abdimas Mandiri*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.36982/jam.v1i2.338>.
- Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.S. (2014) *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*.
- Kurniawan, W. and Maani, K.Dt. (2020) 'Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>.
- Subarsono (2011) 'Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi', *Pustaka Pelajar*, 1(2).
- Tauquurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
- Tono, T., Agustina, D. and Rofiyanti, E. (2019) 'Implementasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Dini pada Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sektor III Menteng Jakarta Pusat', *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1).